

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah qPada Badan Kepegawaian Negara Di Kota Manado

Jenni Y Pangerapan
J. H. Posumah
W. Y. Rompas

Abstract: *Government Regulation No. 8/2006 mentioned that the Government Performance Accountability System is at least able to inform the development of the output of each activity and the results of each program as established in the implementation of the budget document. Under Law 1/2004, the implementation of the budget document, compiled by the minister / head of the institution, outlined the objectives to be achieved, functions, programs and details of activities, the budget provided for achieving these goals, and plan withdrawals each unit of work, and revenue estimated at Kanreg XI BKN Manado. This study used qualitative methods. Source of data / research respondents are not quantified, as needed research. Data collection techniques using interview guide. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed: (1) Data reduction was found that policy Government Performance Accountability System has good staying note again the things that have not been completed (2) Presentation of data found there are still things that need to be considered is the Human Resources (Employee) , Infrastructures, and time Services. Based on the results of the statistical analysis conclude that the implementation of Government Performance Accountability System and positive effect on the Internal Employees Kanreg XI BKN External Employees in Manado and Other Agencies. Based on the conclusion of the study suggested: (1) Judging from all the important aspects of this program, the government should pay more attention again Working Facilities and should improve the quality of service for employees who take care of personnel administration can get good service and deserve from this policy (2) Seen of Human Resources (employee) that is, more attention again due to the fact that there is in the field is still not quite in accordance with the existing workload so that all parties, not just employees in Kanreg XI BKN but employees of other agencies also may pleased with this Policy.*

Keywords: *Performance Accountability System, Government Agencies*

PENDAHULUAN

prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dalam
Diberlakunya UU No 32 Tahun arti Daerah sudah diberi kewenangan yang
2004, tentang Pemerintahan Daerah dan utuh dan bulat untuk merencanakan,
UU No 33 Tahun 2004 tentang mengawasi, mengendalikan dan
Perimbangan Keuangan Negara Pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakan Daerah.
Pusat dan Daerah telah memberikan
kekuatan baru bagi pengembangan Sejalan dengan tuntutan
Otonomi Pemerintah Daerah sesuai dengan masyarakat agar proses penyelenggaraan

kekuasaan Negara khususnya dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi harapan masyarakat lembaga pemerintahan dapat berlangsung dalam mewujudkan pemerintahan yang secara optimal, transparan, akuntabel, adil bersih dan mampu menyediakan barang dan responsif, diperlukan adanya dan jasa serta pelayanan yang optimal komitmen penegakan prinsip-prinsip untuk dapat mengetahui tingkat pemerintahan yang baik (*good governance*) dari semua pihak. keberhasilan suatu Instansi Pemerintah maka seluruh aktivitas Instansi tersebut

Dalam rangka itu diperlukan harus dapat diukur dan pengukuran tersebut pengembangan dan penerapan sistem tidak semata-mata kepada input (masukan) pertanggungjawaban yang tepat jelas dan dari program akan tetapi dilihat dari nyata sehingga penyelenggaraan kemampuan Instansi tersebut berdasarkan pemerintah dapat dilakukan secara berdaya sumber daya yang dikelolanya sesuai guna dan berhasil guna. Perlunya Sistem dengan rencana yang telah disusun.

Pertanggungjawaban Daerah atas segala Kinerja Pemerintah akhir-akhir ini proses tindakan-tindakan yang dibuat banyak menjadi sorotan. Rakyat mulai dalam rangka tata tertib menuju Instrumen mempertanyakan akan nilai yang mereka Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Inilah peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh bagian terpenting untuk ditata yang pada Pemerintah. Selama ini pengukuran akhirnya menjadi Instrumen Good Akuntabilitas Pemerintah dalam Governance. Berdasarkan Peraturan menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 sulit dilakukan secara objektif karena disebutkan bahwa dalam paradigma belum tersedianya suatu sistem pengukuran pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menginformasikan tingkat terdapat prinsip-prinsip keberhasilan organisasi serta masih adanya profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, anggapan bahwa keberhasilan Kinerja pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, Instansi Pemerintah tergantung dari efektivitas, dan supremasi hukum (Suhadi kemampuan Instansi tersebut menentukan & Fernanda, 2001). Dalam bahasa yang anggaran dengan tepat, mengukur hasil lebih sederhana, terdapat tiga prinsip utama maupun dampak yang dicapai dari dalam pemerintahan yang baik yaitu: pelaksanaan program.

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas Laporan Akuntabilitas Kinerja (Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004). Instansi Pemerintah merupakan laporan

Perhatian Pemerintah yang bersih pertanggungjawaban instansi pemerintah yang sungguh-sungguh dalam atas akuntabilitas kinerja yang telah

ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimiliki. Setelah melakukan observasi di lokasi penelitian maka penulis tertarik serta berkeinginan untuk memfokuskan penulisan tugas akhir studi penulis dengan judul Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Kota Manado yaitu inti dari permasalahannya adalah sebuah perencanaan kinerja yang membentuk siklus penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi lebih lanjut kedalam perencanaan kinerja tahunan, untuk kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data penilaian kinerja, analisis, review dan pelaporan kinerja.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan atau dimaksudkan untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan menggambarkan suatu fenomena tertentu (Nasir, 1998). Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian

hipotesis. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sugiyono (2008), bahwa penelitian deskriptif biasanya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Secara harafiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandaan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh Instansi Pemerintah Kanreg XI Badan Kepegawaian Negara di Kota Manado. Dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan dengan metode alamiah. Penelitian ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, keadaan dan tidak bermaksud menguji hipotesis.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Kepegawaian Negara Kota Manado, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada

dalam kaitannya dengan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Kepegawaian Negara Kota Manado Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mencermati staff pegawai dan pimpinan dalam suatu Instansi Pemerintah, tujuannya adalah untuk mempelajari secara intensif tentang proses pertanggungjawaban baik itu dari staff pegawai maupun pimpinan suatu Instansi Pemerintah.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak terlalu mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan responden/informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel bertujuan. Jumlah sampel yang diambil berjumlah 11 orang.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*key instrument*) sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*): Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan

informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian juga untuk merespon berbagai pendapat untuk meningkatkan kinerja organisasi yang akan datang. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang berhubungan dengan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, disertai dengan wawancara bebas.

2. Studi Dokumentasi: Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Data sekunder ini diambil pada dokumen-dokumen instansi terkait.

3. Observasi : Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empiris pada hasil temuan. Hasil observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena yang ada. Dalam melakukan observasi, penulis berada di lokasi penelian Badan Kepegawaian Negara di Kota Manado dan mengamati secara teliti dan saksama keadaan yang sesungguhnya dilapangan serta

mengamati gejala-gejala yang ada dan timbul untuk dijadikan bahan penelitian.

4. Kuesioner (Quotionaire): Kuisisioner atau daftar pertanyaan sebagai urutan pengumpul data primer yang tidak dijaring melalui teknik wawancara. Kuisisioner disusun untuk membantu peneliti dalam menjaring data yang lolos melalui teknik wawancara dan observasi.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini teknik analisis data ialah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian analisis data deskriptif kualitatif berdasarkan pada tabel frekuensi yaitu hasil pengumpulan data direduksi. Istilah reduksi menurut Sugiyono (2008 : 247), dalam penelitian kualitatif ialah sebagai merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting. Langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data : Proses pemilihan, Pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
2. Penyajian Data : Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah

pemahaman, penafsiran dan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi data gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, kuisisioner, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kanreg XI BKN sudah dilaksanakan dengan baik dan benar walaupun belum memenuhi kriteria yang efektif dan efisien tapi secara keseluruhan Kanreg XI BKN telah melaksanakan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat (pegawai) sesuai dengan norma, kewenangan, hak dan peraturan yang berlaku. Ini dapat member petunjuk bahwa penerapan Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya maka dalam mengelola pelayanan atau menerapkan implementasi Kebijakan ada 4 hal penting

yang secara integrative merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yaitu :

1. Dimensi Komunikasi

Menurut kami penerapan dimensi komunikasi dalam proses implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kanreg XI BKN oleh Kepala terhadap seluruh pegawai disampaikan secara transparan dan terbuka. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa informasi yang dikembangkan oleh manajemen kepegawaian Kanreg XI BKN telah terpola dengan baik dan sistematis sehingga seluruh staff pegawai lingkungan internal maupun lingkungan eksternal bisa memudahkan dan mempercepat pelaksanaan kebijakan untuk mengimplementasikan substansi program/kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari dimensi komunikasi sudah dikomunikasikan dengan baik oleh pihak Kanreg XI BKN Manado.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam konteks Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari SDM, mulai dari pimpinan sampai pada pegawai pelaksana, peralatan, fasilitas kerja, financial dan kewenangan. Tanpa sumber daya yang memadai dapat dipastikan kebijakan tidak dapat

diimplementasikan secara efektif. Untuk mengimplementasikan Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kanreg XI BKN walau jumlah pegawai belum cukup memadai akan tetapi mereka bisa dikatakan berkualitas didukung dengan latarbelakang pendidikan sesuai dengan keahlian/bidangnya dibagian/jabatan fungsional.

Dari aspek peralatan dan fasilitas kerja ternyata sebagian pegawai di Kanreg XI BKN mengeluhkan masih kekurangan beberapa alat dan fasilitas kerja untuk menunjang jalannya Pekerjaan di kantor untuk proses Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Disposisi

Salah satu dimensi dari implementasi kebijakan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi adalah sikap aparat pelaksana kebijakan itu sendiri. Hal ini terkait dengan keinginan atau tekad para pelaksana dalam melaksanakan dan menerapkan substansi kebijakan yang akan diimplementasikan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi adalah sistem formal dari beberapa hubungan dan tugas dan otoritas untuk mengendalikan orang-orang organisasi dan mengkoordinir tindakan-tindakan mereka dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Robbins (1994)

mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu system penerapan tugas-tugas yang akan diberi, siapa melakukan apa dan melapor kepada siapa, mekanisme organisasi formal dan pola interaksi yang akan diikuti.

Pemerintah sangat sulit mencegah pengaruh nilai-nilai dan kepentingan umum yang semestinya lebih diutamakan pelayanannya dan kepuasan para pengguna program. Menghadapi persoalan mengenai lebih mengutamakan kepuasan pelanggan internal, terutama kepuasan pimpinan instansi pemerintah atukah harus mengutamakan kepuasan Pegawai untuk mendapatkan pelayanan kepegawaian, semua ini adalah permasalahan yang biasa timbul dari penerapan pelayanan publik.

Namun dari hasil wawancara dan data komunikasi masih ditemukan beberapa kelemahan dan kendala dalam penerapan Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana jumlah pegawai yang masih kurang menyebabkan adanya rangkap jabatan. Sarana dan Prasarana masih kurang sehingga menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan. Membahas tentang keoptimalan Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kanreg XI BKN Manado, bisa dikatakan belum terlalu maksimal karena ada beberapa hal yang perlu dibenahi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepada 11 orang informan tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Negara di Kota Manado adalah Secara umum, hampir semua indikator dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara di Kota Manado sudah berjalan dengan lancar dan sudah cukup baik, kecuali dari indikator sumber daya dari unsur sarana dan prasarana masih ada yang kurang menjang dari sisi jumlah. Sementara itu, standar waktu penyelesaian sudah berjalan secara konsisten karena sudah ada tenggang waktu penyelesaiannya. Disisi pelayanan terdapat kekurangan seperti kurangnya pegawai dalam memberikan pelayanan sehingga terjadi pelayanan yang terkesan lambat.

Selain itu, Ada beberapa faktor penghambat pencapaian keberhasilan tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dari faktor internal organisasi Sumber Daya Manusia (Pegawai), Sarana dan Prasarana yang masih kurang kendala atau hambatan lain juga seperti kurangnya data akibat ketidaktelitian implementor dalam memeriksa administrasi pegawai.

B. Saran

Masih begitu banyak agenda yang harus diselesaikan oleh Kanreg XI BKN Manado. Kendala dan tantangan yang ada juga harus segera dicarikan solusinya agar tidak menghambat kinerja para pegawai. Oleh karena itu kerja sama seluruh personil sangat diperlukan, walaupun dengan kondisi SDM yang terbatas. Situasi tersebut justru harus dimanfaatkan semaksimal mungkin menjadi sebuah peluang untuk mewujudkan sebuah tim yang solid untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati bersama. Mengacu pada hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

- 1) Implementor perlu mengoptimalkan sumber daya, sarana dan prasarana agar proses Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berjalan dengan lebih baik sehingga kinerja pelayanan dapat dicapai secara optimal, efektif dan efisien.
- 2) Untuk mengatasi faktor penghambat seperti kurangnya pegawai dan Sarana dan Prasarana yang masih kurang perlu adanya penambahan pegawai sesuai kualifikasi kebutuhan, dana penambahan untuk sarana dan prasarana aparatur BKN.

DAFTAR PUSTAKA

Nasir M., 1998. Metode Penelitian, Jakarta: Galia Indonesia

Robbins P. S., 1996. Perilaku Organisasi, Konsep-Kontroversi-Aplikasi. Alih bahasa: Hadyana P. Jakarta: Prenhallindo.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Memahami Good Goovernance: dalam perspektif SDM*, Gava Media. Yogyakarta.

Sugiono, 2008, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.

Suhady, Idup dan Desi Fernanda. (2001). *Dasar-dasar Kepemerintahan yang Baik*. Bahan Ajar Diklatpim Tingkat IV. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Sumber Lain :

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan*.

PERPRES No 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

UU No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Daerah

